

**IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-
VI/2008 TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU
SELATAN)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

HENDRI BUDI YANTO

NIM. E0005177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-
VI/2008 TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU
SELATAN)**

oleh:

HENDRI BUDI YANTO

NIM. E0005177

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

Aminah, S.H., M.H
NIP. 195513 198103 2 0001

Sunny Umul Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19700621 200604 2 001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TENTANG PEMILUKADA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Oleh :
HENDRI BUDI YANTO
NIM.E0005177

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 26 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

(1)Sunarno Danusastro, S.H.,M.H. :
NIP.19471231197503 1001

(2)Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H :
NIP.197006212006042001

(3)Aminah, S.H.,M.H :
NIP.195105131981032001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UNS

(Moh. Jamin,S.H., M.Hum)
NIP. 19610930198601 1001

PERNYATAAN

Nama : Hendri Budi Yanto

NIM : E0005177

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

***“IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-
VI/2008 TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU
SELATAN)”***

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan,

Hendri Budi Yanto
NIM. E0005177

MOTTO

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka

Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Al Insyirah: 5-7)

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman

diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Q.S. Al-Mujadilah ayat 11)

“... Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian

dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian,

Allah maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui”

(Q.S. Al Baqarah : 216)

“Sesungguhnya tak seorangpun dilahirkan berilmu.

Ilmu diperoleh dengan belajar”

(H.R. Ibnu Mas’ud, r.a)

PERSEMBAHAN

Karya ini akan senantiasa penulis persembahkan

Kepada Rabb alam semesta, Allah SWT

penguasa langit dan bumi yang mengatur seluruh makhluk-Nya

Aku memuji-Nya atas segala karunia yang diberikan-Nya

Aku memohon tambahan karunia dan kemudahan dari-Nya

Subhanallah wal Hamdulillah wa Laa illa ha illallah wallahu akbar

Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billah

Baginda Rosulullah, Muhammad SAW,

Beliau adalah sebaik-baik makhluk yang menjadi suri tauladan

Semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau,

sahabat beliau serta pengikut beliau yang istiqomah

Kepada bapak dan ibu atas semua doa-doa yang tiada henti terucap

yang dengan ketulusan hati mendidik dan menyayangi penulis

yang dengan segala pengorbanannya sampai kapan pun takkan mampu

membalasnya

yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan caranya

Ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku

kecil

Berikanlah mereka kebahagiaan dunia maupun akherat

Kepada kakak-kakak dan adik penulis yang senantiasa menjadi motivator bagi

penulis

Yang dengan canda dan tawa mereka mampu menghilangkan kelelahan ini

Semoga Allah senantiasa meridhai cita-cita kita baik dunia maupun akherat

Kepada keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan

doa dan semangat untuk penulis

Kepada almamater... Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

ABSTRAK

Hendri Budi Yanto, E0005177. 2010. IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implikasi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis isi (*content analysis*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab III yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan hanya dimohonkan kepada MK untuk memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah tetapi dalam Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan, disini Mahkamah Konstitusi telah memutus melebihi permohonan yang diajukan pemohon dan memutus di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus untuk dilakukannya Pemilu Kepala Daerah Ulang tanpa ikut serta pasangan calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.). Untuk penetapan dilakukannya Pemilu Kepala Daerah Ulang yang seharusnya menjadi kewenangan KPU dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan tersebut. Namun ternyata tidak dilaksanakan oleh KPU pada waktu yang telah di putusan. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *floating* (mengambang) yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk memerintahkan KPU melaksanakan Putusan tersebut. Terlebih Mahkamah Konstitusi belum mempunyai Eksekutor dalam hal pemberian sanksi bagi yang melanggar putusan tersebut.

ABSTRACT

Hendri Budi Yanto, E0005177, 2010. THE IMPLICATION OF CONSTITUTION COURT'S TASK AND AUTHORITY IN RESOLVING THE DISPUTE ON LOCAL GENERAL ELECTION RESULT (A CASE STUDY ON CONSTITUTION COURT'S DECISION NUMBER 57/PHPU.D-VI/2008 ABOUT THE LOCAL GENERAL ELECTION OF SOUTH BENGKULU REGENCY). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to study and to answer the problem about how the implementation of dispute resolution of local generation result is in Constitution Court and how the implication of task and authority of Constitution Court in resolving the dispute on local general election result.

This study belongs to a normative research type that is descriptive in nature. The type of data used was secondary data including primary, secondary

and tertiary law materials. Technique of collecting data used was documentation study using content analysis.

Considering the result of research and discussion the writer has explained in Chapter III referring to the problem statement, the writer concludes as follows:

In the General Election Request of Local Principal of South Bengkulu Regency, the MK (Constitution Court) is only requested to decide the violations occurring in Local Principal General Election but in MK's Decision Number 57/PHPU.D-VI/2008 about the Dispute on General Election of Local Principal and Deputy of Local Principal of South Bengkulu Regency, here the Constitution Court had decided beyond the request applied by the requester and decided beyond the authority of Constitution Court, that is, deciding the implementation of Local Principal General Reelection without the participation from 7th candidate (H. Dirwan Mahmud and H. Hartawan, S.H). The stipulation of Local Principal General Reelection should be the authority of KPU and not Constitution Court.

In the MK's decision Number 57/PHPU.D-VI/2008 about the Dispute on General Election of Local Principal of South Bengkulu Regency instructing the General Election Commission of South Bengkulu Regency to hold the reelection as late as one year after the decision. But, it is not implemented by the KPU at predefined time. It is because the decision of Constitution Court is floating having no binding law power to instruct the KPU implementing such decision. Moreover, the Constitution court has not had the Executor in the term of sanction imposition to those violating such decision.

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahirrabil'alamin. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan mengharap penuh keridhaan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **"IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)"** dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW,

keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu hari yang telah Allah SWT janjikan.

Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak permasalahan dan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang penulis alami dalam menyusun penulisan hukum ini, akhirnya selesai juga berkat bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan ketulusan yang mendalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Pujiono, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Ibu Aminah, S.H., M.H. selaku selaku Pembimbing I dalam penulisan hukum (skripsi) penulis, yang penuh kesabaran memberikan arahan, bantuan serta meluangkan waktu beliau demi keberhasilan penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Sunny Umul Firdaus, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan hukum (skripsi) penulis yang yang penuh kesabaran memberikan arahan, bantuan serta meluangkan waktu beliau demi keberhasilan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Bapak dan Ibu penulis, atas segala doa yang tiada henti terucap, kasih sayang serta dukungan yang tak ternilai;
7. Kakak-kakak penulis (Mba”Ning,Mba”Agnes,Mas Yudi),keponakan penulis (Salma,Sutan,Qaulan) serta keluarga besar penulis atas doa, dukungan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis;

8. Seseorang yang selalu menemaniku, mensupportku saat sedih, yang selalu aku sayangi serta aku jahilin, yang selalu aku panggil Sweety Baby Peyang.
9. Orang-orang yang pernah mengisi relung hati penulis terima kasih atas semangat, kesabaran dan kasih sayang yang pernah kalian berikan, penulis berdoa semoga Tuhan YME selalu menjaga kalian semua.
10. Sahabat: Dony, Indrawan, Rasyid, Culoq, do2t, MzP, Gadiet, Dnang, Boncel terima kasih atas dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama ini;
11. Keluarga besar P3KHAM LPPM UNS. Bapak Sunarno Danusastro, S.H., M.H.; Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., Bapak M. Hendri Nuryadi, S.Pd dan Ibu Aminah, S.H., M.H. Mba' Yayuk; Faisal; Rasyid; Tri Rahmat; Ika, Doni, Indrawan, Ita, Nana Rosita, Raharjo K. terimakasih atas bantuan, kebersamaan dan keceriaannya selama ini;
12. Seluruh rekan-rekan "Bakti Muda" yang ada di kampung halamanku.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh karenanya tiada kesempurnaan dalam karya ini. Namun penulis berharap dari karya yang tidak sempurna ini tetap dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Saran dan dari pembaca budiman sangat penulis perlukan demi perbaikan karya ini. Terimakasih.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan tentang Negara Hukum.....	15
2. Tinjauan tentang Demokrasi.....	21
3. Tinjauan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	24
4. Tinjauan tentang Pemilu Kepala Daerah	31
5. Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi	42
B. Kerangka Pemikiran	46
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA DI DALAM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)	48
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	48
2. Alasan Pengajuan Permohonan PEMILUKADA	49
3. Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.....	52
4. Amar Putusan.....	54
B. Implikasi Tugas dan Wewenang Mahkamah	

Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil

Pemilukada (STUDI KASUS PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

57/PHPU.D-VI/2008TENTANGPEMILUKADA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN) 56

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan *a quo* 56
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
untuk mengajukan permohonan *a quo* 57
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam
Memutus Sengketa Pemilukada 58
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut
UD 1945 63
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan
dengan Pemilu Kepala Daerah 64
6. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Hak-hak Pihak Terkait 64

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi. Dengan adanya prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*) (Miriam Budiarjo, 1994: 183).

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi.

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat menentukan

sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini telah dipertegas dalam UUD 1945 yang menyatakan langsung oleh rakyat. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten.
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum lebih jauh membahas perkara tersebut, ada baiknya kita mengetahui wewenang MK berkaitan dengan perselisihan dalam Pilkada. Menurut UU Pemda, apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK. Keberatan tersebut hanya berkenaan dengan hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pada akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Pilihan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud jatuh pada Mahkamah Konstitusi.

Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) itu sendiri, di dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Mahkamah Konstitusi menjadi trend terutama di negara – negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoriterian ke rezim demokratis. Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi inilah yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang politik hukum nasional karena Mahkamah Konstitusi telah menjadi lembaga yang baru dalam sistem politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia serta belum banyak pustaka yang mengkaji lembaga Mahkamah.

Konstitusi dari sudut pandang politik hukum. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman karena Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi aspek–aspek hukum nasional antara lain peraturan yang berbentuk Undang–Undang yang merupakan letak rumusan suatu politik hukum nasional dan dibuat oleh penyelenggara negara dengan mekanisme perumusan politik hukum nasional. Disebut sebagai bagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman, karena pelaksana kekuasaan kehakiman selain dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebagai contoh kasus terjadinya suatu pelanggaran pada Pilkada Bengkulu Selatan pada tanggal 26 Desember 2008 lalu, yang dimana menghasilkan Pleno KPU yang menyatakan Pasangan Dirwan Hartawan terpilih sebagai Bupati periode 2009-2014 Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Akhirnya Pada Sidang Gugatan Perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi menghasilkan Putusan yang menyatakan Pasangan No. 7, adalah pasangan

yang terpilih versi KPU Bengkulu Selatan, telah gugur sebagai pasangan Pilkada dikarenakan terbukti menurut Mahkamah Konstitusi dari salah satu pasangan calon tersebut pernah menerima hukuman di LP. Cipinang dan secara legalitas hukum yang berlaku sebagai syarat pencalonan menyebutkan bahwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang tuntutan hukumnya lebih dari 5 th, maka dalam amar putusannya MK menilai bahwa sebenarnya Pilkada Bengkulu Selatan tersebut sudah cacat sejak awal proses, sehingga segala tindak hukum yang terjadi setelah nya juga akan menjadi cacat demi hukum. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk memerintahkan KPU dan Panwas melakukan PEMILUKADA ulang.

MK sendiri menegaskan dalam Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PMK No. 15/2008) bahwa obyek perselisihan hasil Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU di daerah yang bersangkutan. Dengan begitu, jelas sudah batas dari kewenangan MK dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Pilkada.

Sebagai contoh lain yang berkaitan dengan implikasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam kasus uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, yang dijadikan permasalahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban khususnya Pasal 10 ayat 2 UU tersebut yang dinilai oleh MK telah melanggar Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945. Menurut pasal 28 D UUD 1945, saksi telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sedangkan menurut Pasal 28 G UUD 1945, saksi telah kehilangan hak konstitusionalnya yaitu hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang berbuat.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen dengan The Guardian of Constitution (Pengawal Konstitusi) harus dapat memberikan perlindungan konstitusional terhadap para saksi dan korban yang telah kehilangan hak konstitusional sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum dengan judul **“IMPLIKASI TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 DALAM PERKARA PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN BENGKULU SELATAN).”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan)?
2. Bagaimana implikasi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan

merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2006:118). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif :

Mengetahui apa substansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Tujuan subyektif :

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman Penulis khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).
- b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986: 7).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis,

dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai obyek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu (Soerjono Soekanto 2006: 10). Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penolakan Putusan Pengajuan Calon Kepala Daerah.

3. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan (Johnny Ibrahim, 2007: 299).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Sedangkan menurut Johnny Ibrahim dari kelima pendekatan tersebut ditambah dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246). Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical*

approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang menguraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-makalah yang menyangkut mengenai pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah independen.

5. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga bahan dari penelitian ini adalah data-data hukum sekunder. Data-data hukum sekunder oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan menjadi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 14-15).

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-subyek pembentuknya, buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johny Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran yaitu berupa **Tinjauan Pertama tentang Negara Hukum** yang meliputi : Pendapat para ahli tentang Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Negara Hukum. **Tinjauan Kedua tentang Demokrasi yang meliputi** Pengertian dan hakikat demokrasi; model-model demokrasi. **Tinjauan Ketiga tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)** meliputi Pemilihan Umum Secara umum, Pemilu Kepala Daerah, sistem Pemilu Kepala daerah dan Peserta Pemilu Kepala Daerah. **Tinjauan Keempat tentang Mahkamah Konstitusi** yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi. **Tinjauan Kelima yang meliputi** tugas dan wewenang KPU Pusat, KPU Propinsi dan KPU kabupaten/Kota.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas tentang :

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Mahkamah Konstitusi
2. Implikasi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB IV : PENUTUP

Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta memuat saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan tentang Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 153). Kemudian Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Budiyanto berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan (Sudargo Gautama dalam Budiyanto, 1999: 50). Sehingga sebuah negara tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. R. Djokosutono sebagaimana dikutip Budiyanto berpendapat bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (R Djokosutono dalam Budiyanto, 1999: 50-51). Hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut. Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Rechtstaat* (badan hukum publik).

Menurut Budiyanto, teori negara hukum secara umum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu teori negara hukum formal dan teori negara hukum material. *Pertama*, teori negara hukum formal, dipelopori oleh Immanuel Kant. Teori mengakibatkan negara bersifat pasif, artinya tugas negara hanya mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja, atau negara hanya sebagai "penjaga malam", sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi, negara tidak boleh mencampurinya. *Kedua*, teori negara hukum material (*welfare state*), yang dipelopori

oleh Kranenburg. Teori ini menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban umum, ia juga ikut bertanggungjawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Teori ini banyak dipraktekkan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia (Budiyanto, 1999: 51).

b. Ciri-ciri Negara Hukum

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum, maka di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku (*due process of law*). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pengertian negara hukum adalah negara yang segala kegiatannya dalam rangka penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Immanuel Kant sebagaimana dikutip Budiyanto, ada empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum, yaitu: (Immanuel Kant dalam Budiyanto, 1999: 51) :

- 1) pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia;
- 2) pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- 3) pemerintahan berdasarkan hukum, dan
- 4) pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, berpendapat bahwa unsur-unsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum dalam arti sempit maupun formal. Dalam arti sempit, pada negara hukum hanya dikenal 2 (dua) unsur penting, yaitu (M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 156) :

- 1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) pemisahan kekuasaan.

Negara hukum dalam arti formal, unsur-unsurnya lebih banyak, yaitu mencakup antara lain:

- 1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) pemisahan kekuasaan;
- 3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
- 4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtstaat*), yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2006: 154) :

- 1) Supremasi hukum (*Supremacy of Law*);
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- 4) Pembatasan Kekuasaan;
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen;
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) Mahkamah Konstitusi;
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtstaat*);
- 11) Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*);
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Di Indonesia simposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta yang diselenggarakan oleh PERSAHI sebagaimana dikutip oleh M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Menurut simposium ini, alat perlengkapan negara hukum hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan

untuk mengadakan aturan itu (prinsip *the rule of law*) (PERSAHI dalam M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 162).

Dari beberapa pendapat tersebut, kemudian Ismail Suny sebagaimana dikutip oleh Budiyo menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut (Ismail Suny dalam Budiyo, 2003: 53) :

- 1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum.
- 2) Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun. Artinya, ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah untuk menjamin hak-hak asasi sehingga hakim betul-betul memperoleh putusan yang objektif dalam memutuskan perkara.
- 3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Jika ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa secara umum Indonesia sudah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum dapat terlihat dari Konstitusi Indonesia. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, bisa ditemukan jaminannya di dalam pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yaitu di dalam Pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab", sedangkan di dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditemui dalam Pasal 27 (persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta

persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 28 (jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat), Pasal 29 (kebebasan memeluk agama), Pasal 30 (kewajiban melakukan usaha pertahanan dan keamanan negara), dan Pasal 31 (jaminan hak untuk mendapatkan pengajaran). Ciri kedua yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan, dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ciri selanjutnya mengenai legalitas dalam arti hukum segala bentuknya dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (*due process of law*) saling keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Macam-macam Tipe Negara Hukum

Tipe negara hukum berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Menurut Budiyanto, di dunia ini terdapat dua tipe negara hukum yang berbeda pula, yaitu Tipe Anglo Saxon dan Tipe Eropa Kontinental (Budiyanto, 2003: 52).

1) Tipe Anglo Saxon, tipe ini bertumpu pada *the rule of law*. Menurut A.V. Dicey, menyatakan *the rule of law* terbagi ke dalam 3 (tiga) unsur pokok berikut (A.V. Dicey dalam Budiyanto, 1999: 52).

a) *Supremacy of the law*, yaitu hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi (kedaulatan hukum), baik penguasa maupun rakyat harus tunduk pada hukum. Ciri khas *supremacy of the law* adalah:

1) hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat;

- 2) negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah pejabat negara;
 - 3) hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh *Supreme of Court* atau Mahkamah Agung
- b) *Equality before the law*, yaitu semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
 - c) *Constitution based on Human Rights*, yaitu adanya jaminan hak-hak asasi warga negara di dalam konstitusi.

Menurut A. V. Dicey selanjutnya yaitu adapun syarat-syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah *the rule of law* terselenggara yakni sebagai berikut (A.V. Dicey dalam Budiyanto, 1999: 52) :

- 1) Perlindungan konstitusional, diatur dalam konstitusi sehingga menjadi kewajiban negara untuk melaksanakannya.
 - 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yaitu bersifat independen dan imparsial.
 - 3) Pemilihan umum yang bebas, baik dalam pemilihan umum negara maupun daerah.
 - 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, namun dalam hal ini kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan YME, sesama manusia, bangsa dan negara.
 - 5) Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi.
 - 6) Pendidikan kewarganegaraan, agar setiap warga negara Indonesia mengetahui dasar ketatanegaraan Republik Indonesia.
- 2) Tipe Eropa Kontinental, pada tipe ini yang berdaulat adalah hukum sehingga hukum memandang negara sebagai subjek hukum yang dapat dituntut apabila melanggar hukum.

2. Tinjauan Mengenai Demokrasi

a. Pengertian dan Hakikat Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli (Azyumardi Azra, 2000: 110):

- a) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b) Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c) Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- d) Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

- e) Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Dengan adanya *control* tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di *follow-up* melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang

saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma) lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

b. Faktor-faktor penegak demokrasi

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri. Ada empat faktor utama yaitu (Azyumardi Azra, 2000: 117–121):

a) Negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*)

Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya

kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM.

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

b) Masyarakat Madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus.

c) Infrastruktur

Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (partai politik), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan.

Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun

dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.

Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, parpol memiliki empat fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai *recruitment* kader dan anggota politik, serta sebagai sarana pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi serta kontrol rakyat melalui parpol. Sedangkan kelompok gerakan dan kelompok kepentingan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintah.

d) Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat (Sukarno, 1986: 30).

c. Model-model demokrasi

- a) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala.
- b) Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaan.

- c) Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.
- d) Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik.
- e) Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai.
- f) Demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
- g) Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (pemilu) oleh rakyat secara langsung.
- h) Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai wakil rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara. Hal ini berarti rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah.

3. Tinjauan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Seperti yang telah disebutkan, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur mengenai perangkat-

perangkat penyelenggaranya, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya

Sebagai penyelenggara pemilu KPU berkewajiban melakukan pendaftaran warga negara yang berhak ikut serta sebagai pemilih dalam pemilu dan Wakil kepala daerah secara menyeluruh. Adanya warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menunjukkan adanya pelanggaran hak politik warga negara dalam pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dan salah satu bentuk pengkebirian suara yang sangat penting dalam pemilu.

Berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2007, KPU dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. KPU

KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta.

Menurut Pasal 8, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU adalah :

Tugas dan wewenang KPU Pusat dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

- 1) Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengoordinasikan dan memantau tahapan;
- 3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
- 4) Menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Propinsi yang terbukti

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

b. KPU Propinsi

KPU Propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi.

Menurut Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Propinsi adalah :

Tugas dan wewenang KPU Propinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- 6) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi;
- 7) Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi yang telah memenuhi persyaratan;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah propinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Propinsi, dan KPU;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah propinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 11) Menerbitkan keputusan kpu propinsi untuk mengesahkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi terpilih dan membuat berita acaranya;
- 13) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi kepada KPU;
- 14) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Propinsi;

- 16) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Propinsi, dan pegawai sekretariat KPU Propinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Propinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Propinsi kepada masyarakat;
- 18) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- 19) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi;
- 21) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi; dan
- 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

c. KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota (Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2007) :

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi dan menyampaikannya kepada KPU Propinsi;
- 9) Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Propinsi;
- 15) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- 16) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 17) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi;

- 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 21) Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau undang-undang.

4. Tinjauan Mengenai Pemilukada

Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa Pemilukada yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini, pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum. sehingga rezim hukumnya tidak dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, melainkan semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Asas umum Pilkada Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman [Orde Baru](#). Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari

pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui

wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

- 1) Pemilihan Umum (*generale election*);
- 2) Referendum (*referenda*);
- 3) Prakarsa (*initiative*);
- 4) Plebisit (*plebiscite*);
- 5) Recall (*The recall*);
- 6) Mogok Kerja;
- 7) Unjuk Rasa;
- 8) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of asocation*) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat

martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

1) Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

Tujuan penyelenggaraan pemilu (*general election*) itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu: (Jimlly Asshiddiqie; 2007:754)

- a) Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan bahwa pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya pemilu juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan sesuatu yang harus dinikmati untuk selama-lamanya.

Yang dipilih dalam pemilu (*general election*), tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk dikursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota,

sedangkan di cabang kekuasaan eksekutif para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Dengan adanya pemilu yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksudkan juga dapat terseenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik dilembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif.

Oleh karena itu, pemilu (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Yang dimaksud dengan memungkinkan disini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Yang dimaksudkan memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi jika benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (*jurdil*).

Tujuan ketiga dan keempat pemilu itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan kemajuan negara, rakyatlah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan berlangsungnya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD 1945 adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Karena itu, penyelenggaraan pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan

hak asasi warga negara. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat secara periodik. Demikian pula guna memilih para wakil rakyat secara periodik.

Disamping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat maupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan terkait (*stake holder*). Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tetapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya jika pemerintahan tersebut terbentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

2) Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi

Partai Politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap system demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antar proses-proses

pemerintahan dengan warga negara, Bahkan banyak yang berpendapat partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaanya dalam setiap sistem politik yang demokratis.

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat(1) Undang-Undang No 2 Tahun 2008)”

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok *elite* yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu kekuasaanya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan umum.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balance* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-

fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *checks and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan disuatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Tentu saja partai politik merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terbentuk dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dan lain sebagainya.

3) Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Jimmly Asshiddiqie pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik meliputi (Jimmly Asshiddiqie, 2007: 717-720):

a) Komunikasi politik

Sebagai sarana komunikasi politik parati sangat berperan penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau *political interest* yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu

diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

b) Sosialisasi politik

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai politik juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

c) Rekrutmen politik

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader kepemimpinan negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang langsung dipilih oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh DPR, ataupun melalui cara-cara tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan profesional dalam pegawai negeri misalnya tidak boleh melibatkan partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik (*political appointment*) misalnya untuk pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung

ataupun tidak langsung partai politik dapat berperan. Dalam hal inilah fungsi partai politik dalam rangka rekrutmen politik (*political recruitmen*) dianggap penting. Sedangkan untuk pengisian jabatan negeri partai sudah seharusnya dilarang untuk terlibat dan melibatkan diri.

d) Pengaturan Konflik

Nilai-nilai dan kepentingan dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

4) Kelemahan Partai politik

Adanya organisasi itu, tentu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya ialah bahwa organisasi cenderung bersifat oligarkis. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik, kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataan dilapangan berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri.

5) Partai Politik Peserta Pemilu

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum itu apabila telah memenuhi syarat-syarat :

- a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

- b) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e) Memiliki anggota sekurang kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- g) Mengajukan nama tanda gambar partai politik kepada KPU.

5. Tinjauan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang – undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan / atau wakil presiden (*impeachment*).

Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah : Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the guardian of constitution (penjaga konstitusi), dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi. Sedangkan peranannya adalah : sebagai salah

satu pelaku kekuasaan kehakiman, dalam mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara, serta mewujudkan kesejahteraan Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan (2) mahkamah kontitusi mempunyai wewenang (www.jurnalhukum.blogspot.com):

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih diperinci lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10, yaitu (Maruara Siahaan.2005:15):

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar mempunyai 2 macam jenis pengujian, yaitu pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative telah dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian Undang-undang

terhadap Undang-undang Dasar berdasarkan Pasal 51 ayat (1), pemohon adalah

- a) Perorangan warga negara Indonesia
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Lembaga negara yang dimaksud disini adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan pembatasan seperti itu maka jelaslah lembaga negara mana saja yang mendapat kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menghindari terjadinya multitafsir. Akan tetapi Pasal 65 UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian dengan menyebutkab bahwa, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

- 3) Memutus pembubaran partai politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politi dan merebut kekuasaan partai politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.pada dasarnya pembubaran partai politik bertentangan dengan HAM seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3),bahwa *“setiap orang berhak satas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Akan tetapi dalam prakteknya pembubaran partai politik

dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran terhadap ideology dan pelanggaran hukum.

4) Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu

Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu sangatlah terbuka lebar dalam setiap pelaksanaan pemilu di suatu negara, terlebih lagi Indonesia yang baru menapaki jejak baru berdemokrasi. Pemilu sebagai “medan pertempuran” bagi para kontestan dalam memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pemanfaat peluang sekecil apapun untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Dalam perselisihan hasil pemilu ini, pemohon adalah:

- a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu.
- b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- c) parta politik peserta pemilihan umum.

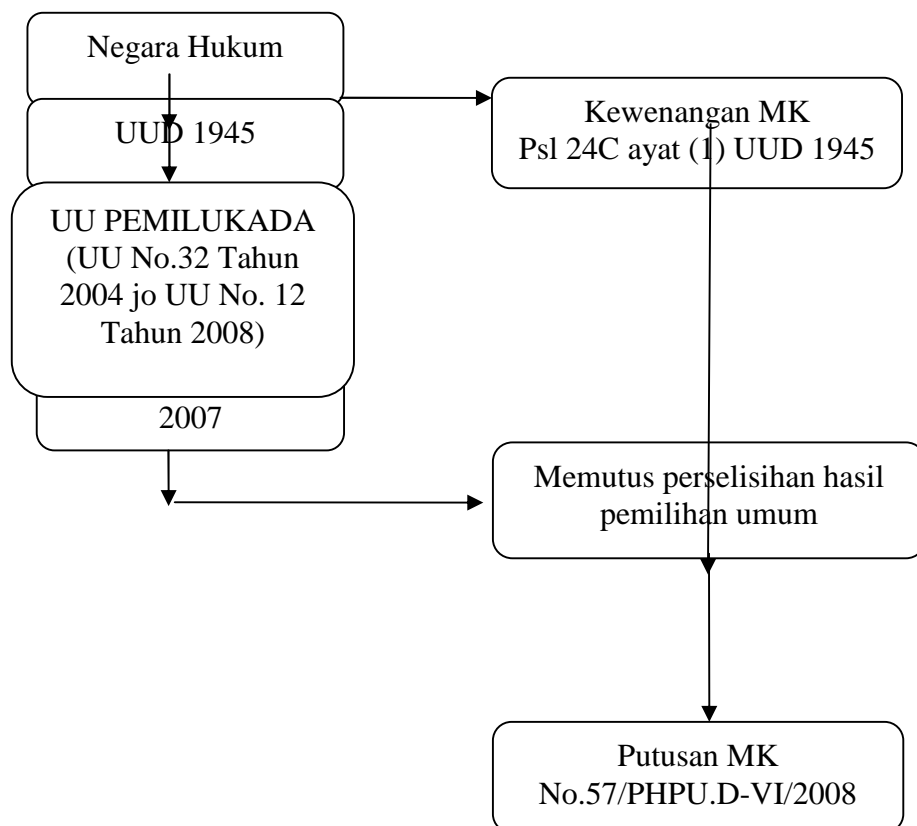
5) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

DPR dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi jika menurut DPR Presiden dan Wakil Presiden terduga:

- a) melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau

- b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

B. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas mencoba memberikan gambaran selengkapnya mengenai alur berfikir dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang menjadi bahan penelitian mengenai analisis putusan MK No.57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan Diawali dengan adanya hak politik warga negara seperti yang diamanatkan dalam UUD Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* serta ayat (3) yang menyatakan, *“setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”* Hak politik tersebut diwujudkan dalam partisipasi warga negara dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan berdasarkan ketentuan Menurut UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut tercantum syarat-syarat yang menentukan batasan warga negara yang dapat menggunakan hak pilihnya seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).. Dengan berlakunya ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka ada pihak-pihak yang dirugikan karena tidak dapat melaksanakan hak politiknya sebagai warga negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA DI DALAM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TENTANG PHPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada (Jurnal Konstitusi volume 6 nomor 3: hal 120).

Dalam pengajuan perselisihan hasil perolehan suara pemilukada yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada yaitu:

Pasal 5

- 1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- 2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.”

Pasal 6

- 1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan tersebut diserahkan dalam 12 rangkap setelah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dari pemohon.
- 2) Atas permohonan tersebut, permohonan asli harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi dalam 3 hari sejak habisnya batas waktu pengajuan permohonan. Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal, antara lain:
 - a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;
 - b. Permohonan tersebut menguraikan tentang:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - c. Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

Dalam memutus perkara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yang merupakan Hakim Pleno dan Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh delapan hakim pleno antara lain Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mahfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

2. Alasan Pengajuan Permohonan PHPU

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II, yang menyebabkan Pemohon ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 36.566 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh sejumlah 39.069 suara (<http://pemilukada.blogspot.com>).

Pemohon mendalilkan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada melalui cara-cara yang tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana yang dilakukan dengan cara:

- a) Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H., yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992 menjadi seorang Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang melanggar Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada;
- b) Bahwa fakta Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Cipinang dari tahun 1985 sampai 1992, telah diperkuat dengan kesaksian tertulis dari:
 - 1) Surat Pernyataan M. Zayadi yang pernah mendekam di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H.

- 2) Surat Pernyataan Hasnul Arifin yang juga pernah menjalani hukuman penjara di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H.
 - 3) Surat Pernyataan H. Asranuddin Bais, Pegawai Negeri Sipil LP. Klas I Cipinang
 - 4) Surat Pernyataan Achmad Busri, Pegawai Negeri Sipil LP. Klas I Cipinang
 - 5) Surat Pernyataan Tomy Arifin, Pegawai Negeri Sipil Bagian Staf Registrasi LP. Klas I Cipinang
 - 6) Surat Pernyataan Haryanto alias Yan Bin Sulaiman yang pernah menjalani pidana penjara di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H.
- c) Fakta hukum bahwa Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan informasi dari pihak LP. Cipinang, Jakarta Timur; Tim Pemenang HARARI juga telah menyampaikan surat kepada Kepolisian Daerah Bengkulu terkait fakta Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, tetapi Polres Bengkulu Selatan tanpa melakukan konfirmasi ke LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur telah memberikan tanggapan tidak benar atas fakta hukum tersebut;
- d) Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten

Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tahun 2008 adalah tidak sah

- e) Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif, tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- f) Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- g) Tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- h) Adanya pemilih terdaftar yang memilih lebih dari satu kali;
- i) Adanya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H
- j) Surat Pernyataan H. Dirwan Mahmud tentang janji pemberian perluasan areal perkebunan Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, tertanggal 2 November 2008 dengan diketahui/disaksikan oleh Camat Air Nipis Harjo
- k) Adanya intimidasi oleh TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H
- l) Adanya orang yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak mendapat undangan, namun memilih dengan menggunakan undangan pemilih lain

3. Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

Pengaturan mengenai hukum acara dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada diatur dalam PMK No 15 Tahun 2008. peraturan ini

dibuat mengingat bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keberadaan Peraturan Mahkamah konstitusi Ini menjadi penting, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) di Negara Republik Indonesia ini merupakan lembaga Negara relatif baru maka pemahaman dan kejelasan aturan main terutama yang menyangkut hukum formilnya seperti persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik oleh Pemohon. Diterbitkannya PMK No 15 Tahun 2008 dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas ditengah jalan sehingga mengakibatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus menetapkan permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima (*niet ovanlijke verklard*). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan PMK No 15 Tahun 2008 adalah

a. Para pihak

Para pihak adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada yang dibedakan atas:

- 1) Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- 2) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Sedangkan pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil PemiluKada

b. Objek perselisihan

Objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau
- 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sedangkan permohonan yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat waktu mengajukan permohonan. Kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.

Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilukada diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;

Sedangkan didalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat ;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Hal yang berbeda terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi in casu. Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan untuk membatalkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan serta Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Amar putusan ini jelas secara legal formal bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini telah melewati batas kewenangannya dengan mengenyampingkan dan mengabaikan hukum formal sengketa pemilukada serta berakibat terhadap "kepastian hukum" dalam sengketa Pemilukada. Padahal demi tercapainya keadilan kepastian hukum perlu diutamakan. Sedangkan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi *in casu*, demi keadilan, majelis hakim telah menetapkan putusan yang mengenyampingkan kepastian hukum itu sendiri .

Demi keadilan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut telah mengenyampingkan kepastian hukum sebagai asas dasar dalam penegakan hukum, sedangkan keadilan sebagai tujuan hukum terasa menjadi sangat relatif, dikarenakan cara pandang hakim dan ilmuwan yang berbeda terhadap makna hukum dan keadilan itu sendiri karena adanya berbagai macam teori hukum yang terus mengalami perubahan dari teori yang satu ke teori yang lain dalam rangka mencari kebenaran dan kemudian berkembang menjadi aliran hukum. Dengan adanya berbagai aliran hukum tentu memberi makna bahwa para hakim tidak mungkin kesemuanya berada dibalik satu aliran hukum yang sama. Pastilah para hakim berada dibalik aliran hukum yang berbeda. Dalam situasi itulah

hukum Indonesia berjalan dan akan menjadi bagian dari masalah dari penegakan hukum di Indonesia .

4. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junctis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka

untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

C. Implikasi Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang PHPU Kabupaten Bengkulu Selatan)

Sebelum masuk kedalam substansi pokok, yaitu pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi, penulis akan sedikit menguraikan kembali tentang tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dibawah ini akan disajikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Sebelum membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi, penulis ingin membahas sekilas mengenai pengertian permohonan *a quo*. Permohonan *a quo* adalah suatu permohonan yang terhadap suatu perkara hukum tetapi perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak jelas dasar hukumnya. Dengan kata lain, tidak ada payung

hukum yang jelas dalam pengaturan sehingga pihak yang mengajukan permohonan dirugikan hak konstitusionalnya.

Sebagai sengketa keberatan atas penetapan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dijelaskan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kewenangan tersebut ditafsirkan sebagai kewenangan konstitusional yang statusnya disamakan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Terhadap sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada ini, yaitu Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II berdasarkan Hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, telah memenuhi syarat kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pendapat ini didasarkan pertimbangan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008

- b. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 36.566 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh sejumlah 39.069 suara;
- c. Bahwa menurut Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada melalui cara-cara yang tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana yang dilakukan dengan cara :
 - 1) Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
 - 2) Membiarkan adanya warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;
 - 3) Membiarkan adanya warga yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
 - 4) Membiarkan adanya praktik pemberian barang/uang (*money politic*) atau janji tertentu kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - 5) Membiarkan adanya intimidasi kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- 6) Membiarkan adanya penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak;

Dari pertimbangan Mahkamah tersebut diatas bahwa pendapat Mahkamah yang menyatakan Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan sangatlah beralasan, karena terlihat hubungan jelas antara kepentingan Pemohon dengan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilukada tersebut yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU, karena beranggapan adanya kesalahan penghitungan hasil Pemilukada yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi dalam terdapat kekurangan dan kelemahan, Pemohon dalam permohonannya tidak memberikan uraian yang jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru memberikan penjelasan tentang adanya dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang menurut Pemohon diabaikan oleh KPU dan secara *legal formal* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran administrasi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan bahwa Pihak Terkait Pernah di hukum pidana Penjara karena tindak pidana Pembunuhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan pencalonan peserta Pemilukada.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilukada

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah sengketa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu antara peserta pemilihan kepala daerah dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPU/KIP). Yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah:

- a. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- c. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- d. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- e. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- f. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- g. Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Berkaitan dengan pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud angka (1) pasal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, Pasal 236C menyebutkan;

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangannya dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dalam Konsideran peraturan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangannya dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai kewenangan konsitusional yang statusnya disamakan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Hal ini mungkin dapat kita pahami apabila kita kembali kepada pendapat Jimly Ashiddiqie tentang rezim hukum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diserahkan kepada *legal police*

pembentukan Undang-Undang, karena pada perkembangannya, terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Permasalahan tersebut terjawab sudah berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) tersebut yang menyebutkan:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam ketentuan pasal Ini pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah telah definisikan sebagai pemilihan umum, maka pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat digolongkan sebagai peserta pemilihan umum, sehingga rezim hukum dapat dikaitkan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Perkembangan ini dijadikan dasar Konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan sejak kapankah kewenangan dalam memutus perselisihan hasil perselisihan Pilkada tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum. Sehingga menyebabkan mahkamah Konstitusi menolak memutus perkara tersebut. Pada akhir putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan suatu saat untuk menjadikan Pilkada yang pada waktu itu masih dikenal dengan istilah Pilkada untuk memasukkan sebagai bagian dari Pemilu dengan menyerahkan hal tersebut kepada Pembentuk undang-undang sebagai *legal police* (<http://www.miftakhulhuda.com/2009/03/menyoroti-ketetapan-mk-soal-hasil.html> diakses tanggal 14 April 2010 jam 06.05).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang penulisan ini, pemilihan kepala daerah menjadi bahagian dari Pemilu sejak

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang tersebut telah menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bahagian dari Pemilu sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang tersebut. Apabila kita mencermati lebih lanjut dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tertanggal 21 Maret 2005, maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah berwenang memutus perselisihan hasil Pemilukada sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kesimpulan ini didasarkan atas pemikiran bahwa penetapan dan pemberlakuan Undang-Undang tersebut sudah merupakan legal police baru dalam penyelenggaraan Pemilukada sehingga menjadi bagian dari Pemilu. Hal ini berarti pula bahwa pada waktu itu telah terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada. Dualisme tersebut terjadi antara kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seara konstitusional bewenang dalam sengketa Pemilu sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Sehingga menimbulkan permasalahan ketatanegaraan baru tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperintahkan langsung oleh UUD 1945. Terhadap hal ini berlaku ketentuan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, walaupun pembentukan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Permasalahan inilah yang sebenarnya menjadi latar belakang dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang salah satu pasalnya mengatur tentang pengalihan kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa suatu perkara yang diajukan ke Mahkamah yang telah diputus menjadi suatu putusan final dan tidak dapat diajukan gugatan lagi. Seperti yang telah dijelaskan dalam jurnal internasional berikut(balochbnp@gmail.com):

“A constitutional court is regarded as the highest court when it comes to the interpretation, protection and enforcement of the constitution. The German, French, Spanish and Italian constitutional courts have played a pivotal role in reducing and preventing institutional conflicts and in promoting a cooperative federal system. The role of a constitutional court in Italy includes monitoring and addressing economic and social discrimination. The one in Spain is the supreme interpreter of the constitution. Such a court has the power to safeguard all fundamental rights”.

Dengan begitu, Mahkamah dalam putusannya juga mempertimbangkan dan melindungi hak mendasar warga negara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Jurisdiction in electoral matters (Wahlgerichtsbarkeit) @austria (Art. 141 B-VG)

In a democratic state it must be possible to examine the legitimacy of elections. Therefore, all important elections, referenda, consultative referenda or people's initiatives can be challenged at the Constitutional Court. An illegality in the electoral process can result in the annulment and repetition of the entire election or part of the election. However, this is only the case if the illegality could have influenced the results of the election. The Constitutional Court also determines whether or not a person should lose a seat he has already acquired (such as a seat in the National Council)”(<http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/index.html>).

Dalam jurnal internasional tersebut dijelaskan bahwa pentingnya nilai demokratis dalam suatu pemilihan umum sehingga Mahkamah

Konstitusi di negara lain diberikan kewenangan untuk menyatakan keabsahan suatu pemilihan umum.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah

Pada dasarnya, tidak banyak Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Pemilu Kepala daerah hanya saja Mahkamah Konstitusi menggolong-golongkan secara spesifik untuk setiap pelaksanaan Pemilu baik Pemilu Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Kepala Daerah. Untuk Pemilu Kepala Daerah hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

6. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak-hak Pihak Terkait

Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* yang demi keadilan telah menetapkan dan memerintahkan dilaksanakan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan Pihak Terkait, terlepas dari Pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu di Bengkulu Selatan telah cacat hukum karena terjadinya pelanggaran asas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilu. Putusan tersebut dari perspektif lain tentu saja menimbulkan permasalahan baru.

Dari perspektif keadilan hukuman dan hak-hak konstitusional warganegara serta hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, setiap warganegara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun, serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Keseluruhan rangkaian hak tersebut merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan selaras dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai perlindungan hak konstitusional warganegara dan hak asasi manusia (*The Protector of the Citizens' Constitutional Right and the Protector of human right*). Permasalahannya dari sisi keadilan hukuman, apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dirasakan cukup adil khususnya Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 7) dan tidak melanggar hak-hak konstitusional pihak terkait atau mungkin putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengakibatkan kematian Perdata (*burgerlijke dood*) Pihak Terkait (<http://patrius.blogspot.com/2009/10/kajian-putusan-mahkamah-konstitusi.html> kajian putusan MK Bengkulu Selatan diakses tgl 5 Mei 2010 jam 20.00).

Perlu diperhatikan bahwa terjadinya pelanggaran administratif yang dilakukan salah satu Pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah yaitu ketentuan Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam hal ini Pihak Terkait Dirwan Mahmud alias Roy Irawan sebagai calon bupati Bengkulu Selatan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kerana tindak pidana berat telah melakukan pembunuhan, yang seharusnya Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut, karena suatu kebohongan dan keliruan Pihak Terkait dinyatakan lolos sebagai Pasangan Calon dan berhasil menjadi pemenang dalam Pemilukada tersebut. Kemudian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Pihak Terkait terbukti sengaja melakukan pemalsuan terhadap kelengkapan persyaratan tersebut sehingga mengakibatkan pelaksanaan Pemilukada Bengkulu Selatan cacat hukum sehingga diharuskan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Permasalahannya, kebohongan dan kesalahan tersebut apakah sebanding dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang, sehingga putusan mahkamah Konstitusi tersebut dirasakan sebagai sebuah putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Terhadap Pihak Terkait yang dalam hal Calon Bupati Terpilih sebagai Pihak yang melakukan Kebohongan atau ketidakjujuran apabila kita kaitkan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, maka perbuatan Calon Bupati terpilih yang menyatakan dirinya tidak pernah pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berarti bupati terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dalam ketentuan pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Maka hal tersebut dari satu sisi mungkin bisa dianggap memenuhi rasa keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimanakah dengan Pihak Terkait yang dalam hal ini Calon Wakil Bupati Terpilih yang juga turut dihilangkan haknya untuk ikut dalam

pemungutan suara ulang, padahal ia tidak melakukan kesalahan dan kebohongan sebagaimana yang dilakukan Calon Bupati Terpilih. Terhadap hal ini juga akan memunculkan permasalahan baru yaitu apakah mungkin calon wakil bupati terpilih karena pertimbangan tidak melakukan kesalahan secara pribadi dapat menggantikan posisi Calon Bupati Terpilih untuk dilantik menjadi Bupati.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, apabila keadilan dilihat dari orang yang melakukan kesalahan dan akibat hukumannya, benar bahwa Calon Wakil Bupati Terpilihlah yang paling dirugikan haknya, akan tetapi hal ini haruslah dikembalikan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia menentukan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dalam satu pasangan calon. Maka sebagai pasangan calon yang dipilih secara berpasangan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No 12 Tahun 2008 merupakan satu kesatuan. Maka bagi Calon Wakil Bupati Terpilih hal tersebut merupakan suatu konsekuensi hukum yang harus diterima secara bersama sebagai akibat hukum pelanggaran administratif dan pelanggaran asas dalam pelaksanaan Pemilu. Sebagai pasangan calon mereka tidaklah bisa dilihat sebagai dua pribadi yang berbeda dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.

Dalam hal Calon Wakil Bupati Terpilih dapat menggantikan posisi Calon Bupati Terpilih untuk dilantik menjadi Bupati, hal tersebut hanyalah dapat dilakukan dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap. Yaitu suatu keadaan dimana calon kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan. Sedangkan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu Bengkulu Selatan periode 2008-2013, calon kepala daerah atau bupati terpilih tidaklah dapat disamakan dengan Berhalangan tetap, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal

yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi Pihak Terkait terbukti sengaja melakukan pemalsuan terhadap kelengkapan persyaratan pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam perkembangannya ketentuan pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 4/PUU-VII/2009 yang bacakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran dan keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Apabila kita perhatikan putusan Mahkamah Konstitusi ini dan mencoba membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa penetapan hasil Pemilukada kabupaten Bengkulu selatan, ada kesan bahwa Mahkamah Konstitusi tersebut bertantangan dan mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak konsisten. Karena ketidakjujuran dan pemalsuan yang dilakukan Pihak Terkait adalah untuk menerobos ketentuan yang kemudian ditetapkan inkonstitusional bersyarat. Terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi mencoba memberikan penjelasan bahwa sikap Mahkamah Konstitusi tidaklah bertentangan, apalagi sampai

dikatakan tidak konsisten. Ada dua alasan mengapa Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat demikian:

- a. Perkara Nomor 057/PHPU.D-VI/2008 adalah sengketa hasil pemilukada yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa calon Bupati yang terpilih adalah calon yang nyata-nyata sejak awal tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku yakni “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan batal hasil pelaksanaan Pemilukada Bengkulu selatan karena pemenangnya nyata-nyata tidak memenuhi syarat sejak awal.
- b. Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah perkara pengujian konstusionalitas norma Undang-undang terhadap UUD 1945 dan bukan penerapan ketentuan Undang-Undang yang masih berlaku. Oleh karena menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan Undang-Undang tentang “syarat tidak pernah dijatuhi pidana” telah melanggar UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa ketentuan undang-undang ini merupakan ketentuan yang inkonstitusional bersyarat.

Kedua pertimbangan tersebut yang dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tetap berpendapat bahwa putusan Mahkamah atas kedua perkara tersebut tidaklah bertentangan, melainkan berlaku sesuai dengan jenis perkara masing-masing, yakni perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 merupakan sengketa tentang penerapan ketentuan undang-undang yang masih berlaku, sedangkan perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 merupakan perkara tentang pengujian konstusionalitas norma Undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya kedua putusan tersebut tetap berlaku sebagai putusan final sejak diucapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan tersebut tidak dapat dijadikan *novum*.

Seandainya putusan ini dikeluarkan lebih awal, setidaknya sebelum pelaksanaan Pemilu kabupaten Bengkulu Selatan periode 2008-2013, maka permasalahan yang menjadi dasar diajukannya sengketa keberatan penetapan hasil Pemilu kabupaten Bengkulu Selatan akan tetap berada dalam ruang lingkup hukum formal sengketa keberatan penetapan hasil Hasil Pemilu. Karena Pihak Terkait khususnya calon Bupati terpilih dapat mencalonkan dirinya sebagai Pasangan Calon dengan tanpa harus melakukan Pemalsuan dan cukup hanya memperhatikan dan memenuhi beberapa persyaratan dalam norma inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) Pasal 58 huruf (f) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi faktanya pada waktu pencalonan ketentuan Pasal tersebut masih menjadi norma hukum positif yang harus ditaati.

Bagi Pihak terkait, putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu Bengkulu Selatan tentu saja merugikan hak Pihak Terkait. Amar putusan yang memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakannya merupakan putusan yang bersifat final, mengikat dan harus dilaksanakan. Ditetapkannya pasal 58 huruf (f) sebagai norma inkonstitusional bersyarat telah memulihkan hak konstitusional Pihak Terkait sebagai warganegara sepanjang dipenuhinya beberapa persyaratan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kemudian apabila kita kembali melihat sikap Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan alasan yang digunakan untuk menyatakan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pertimbangan tersebut berlaku sesuai dengan jenis perkara masing-masing, yakni perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 merupakan sengketa tentang penerapan ketentuan undang-undang yang masih berlaku, sedangkan perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 merupakan perkara tentang pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945.

Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang merupakan sengketa tentang penerapan ketentuan undang-undang yang masih berlaku dalam hal ini merupakan sengketa keberatan penetapan Hasil Pemilihan yang mempunyai hukum formal sendiri (PMK No 15/2008), Mahkamah Konstitusi Memberikan putusannya yang didasarkan atas pertimbangan hukum dalam rangka melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga dan Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitutional*), yang seharusnya penggunaan fungsi tersebut lebih sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila kita kembalikan kepada fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya juga dalam sengketa Pemilihan tersebut Mahkamah Konstitusi haruslah lebih memperhatikan fungsi-fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai perlindungan hak konstitusional warganegara dan hak asasi manusia (*The Protector of the Citizens' Constitutional Right and the Protector of human right*). Karena terhadap hal tersebut Mahkamah konstitusi memberikan pandangan bahwa hal tersebut menjadi ranah pembentuk Undang-Undang (legislatif) untuk mengakomodasi melalui perubahan berbagai peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyadari dan membiarkan tentang adanya kemungkinan inkonstitusional pasal 58 huruf (f) dan kemungkinan dilanggarnya hak konstitusional Pihak terkait dengan tetap diberlakukannya Pasal 58 huruf (f) tersebut. Kemungkinan tersebut akan tetap berlangsung sampai adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut yang dilakukan oleh pembuat kebijakan (*legislative review*) atau adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mambatalkan pemberlakuan ketentuan pasal tersebut karena pertimbangan konstitusional (*judicial review*).

Permasalahan sebenarnya terhadap hak-hak Pihak Terkait terlatap pada konsep keadilan seperti apakah yang akan ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ajaran positivisme, yang menitikberatkan pada

studi hukum formal, walau mengakui adanya peranan etika dan moralitas terhadap perkembangan hukum tetapi berupaya memisahkan antara hukum dan moralitas demi pemahaman hukum yang murni, maka berdasarkan ajaran ini putusan Mahkamah Konsittusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 sangatlah tidak sesuai dan bertentangan karena menganyampingkan hukum formal perselisihan hasil Pemiluada serta telah menghilangkan hak kewargaan Pihak terkait untuk dapat dipih.

Dalam interpretasi yang konstruktif terdapat hubungan antara tujuan dan obyek permasalahan. Maka konsep keadilan yang akan ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi haruslah mempunyai hubungan yang jelas antara tujuan dan objek permasalahan yang sedang ditanganinya. Artinya bahwa dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan interpretasi yang konstruktif untuk memperoleh hasil terbaik yaitu keadilan substantif. Berdasarkan pemikiran dan pemahaman ini apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sangat beralasan dan dapat diterima.

Tidak di ikutsertakannya Pihak terkait dalam pemungutan suara ulang tidaklah dapat ditafsirkan terlalu jauh bahwa Pihak terkait kehilangan segala hak keperdataanya, karena tiada satu hukumanpun dapat mengakibatkan kematian Perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan. Dan berdasarkan ajaran positivisme ini, sebenarnya Pihak terkait tidaklah kehilangan hak untuk dipilih yang merupakan hak konstitusional warganegara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikutsertakan Pihak terkait dalam pemungutan suara ulang, merupakan suatu proses pengembalian pelaksanaan pemiluada yang sesuai dengan aturan sebenarnya. Pemungutan suara ulang bukanlah merupakan Pemiluada baru yang berbeda, tetapi kelanjutan dari rangkaian Pemiluada yang penetapan hasilnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemiluada ini masih tunduk pada ketentuan Pasal 58 huruf (f) sebelum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Persoalan positivisme *in-casu* tersebut hanya terletak pada kewenangan mahkamah

Konstitusi dalam memeriksa pokok perkara sebagaimana diakui sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Permohonan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan hanya dimohonkan kepada MK untuk memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah tetapi dalam Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Mahkamah Konstitusi telah memutus melebihi permohonan yang diajukan pemohon dan memutus di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus untuk dilakukannya Pemilu Kepala Daerah Ulang tanpa ikut serta pasangan calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.). Penetapan dilakukannya Pemilu Kepala Daerah Ulang yang seharusnya menjadi kewenangan KPU bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan tersebut. Namun ternyata tidak dilaksanakan oleh KPU pada waktu yang telah di putusan. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *floating* (mengambang) yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk memerintahkan KPU melaksanakan Putusan tersebut. Terlebih Mahkamah Konstitusi belum mempunyai Eksekutor dalam hal pemberian sanksi bagi yang melanggar putusan tersebut.

B. Saran

1. Walaupun pelaksanaan Pemilukada telah banyak mengalami kemajuan yang berarti. Namun kedepan harus ada suatu pembenahan dan penyempurnaan aturan-aturan hukum pelaksanaan Pemilukada yang dimulai dengan Amandemen Konstitusi sebagai hukum dasar dengan memperjelas arti pemilihan demokratis dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menjadi pemilihan umum langsung dan kemudian menyelaraskannya dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 dengan memperluas arti Pemilihan yang didalamnya termasuk Pemilukada. Amandemen atau perubahan tersebut menjadikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Pemilu mempunyai dasar konstitusional yang kuat. Sehingga tidak lagi didasarkan atas *legal police* dalam Perundang-undangan yang disebabkan oleh pengaturan konstitusional tentang Pemilu dan Pemilukada yang multitafsir. Serta meminimalkan terjadinya pelanggaran konstitusi dalam praktek berbangsa dan bernegara.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi *in casu* tidak lepas dari permasalahan-permasalahan dan controversial sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu kedepan, asas sosialisasi dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi haruslah benar-benar dipastikan pelaksanaannya. Karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dapat memicu timbulnya konflik yang dapat melibatkan masyarakat pendukung pasangan calon. Ketidak pahaman Masyarakat dan ketidak puasan Pasangan Calon yang dirugikan dalam putusan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan dengan meningkatkan kecerdasan serta pemahaman Masyarakat akan substansi permasalahan. Disisi lain dapat menjamin pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang akan dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh masyarakat mengingat akan fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi serta menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjamin terlaksananya konstitusi secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azyumardi, Azra. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta : Prenada Kencana.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar.1993.*Beberapa Masalah Ketatanegaraan Republik Indonesia*.Bandung:Alumni.
- Budiyanto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Dahlan Thaib dkk.2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan Thaib, Jasim Hamidi, Ni'matul Huda.2001.*Teori dan Hukum Konstitusi*.Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Dasril, Radjab.2005. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet II*.Jakarta:Rineka Cipta
- Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*.Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Jimly, Asshiddiqie.2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta
- Johnny, Ibrahim. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Maruara, Siahaan.2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press
- Miriam Budiharjo. 1986.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
Sukarno. 1986. *Pers Bebas Bertanggung Jawab*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
Taufiqurrohman, Syahuri. 2004. *Hukum Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Internet

www.mahkamahkonstitusi.go.id/Sinopsis/sinopsis_57phpud2008.pdf diakses pada hari minggu tanggal 10 April 2010 jam 04.05

<http://patrius.blogspot.com/2009/10/kajian-putusan-mahkamah-konstitusi.html>

diakses tgl 5 Mei 2010 jam 20.00

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/mahkamah-konstitusi-ri.html> diakses

tanggal 10 Mei 2010 jam 17.05

<http://www.miftakhulhuda.com/2009/03/menyoroti-ketetapan-mk-soal-hasil.html>

diakses tanggal 14 April 2010 jam 06.05

http: [//www.balochbnp@gmail.com](http://www.balochbnp@gmail.com)diakses diakses tanggal 11 juli 2010 jam 20.10

<http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/index.html> diakses tanggal 11 Juli 2010 jam 20.15

Jurnal

Veri Junaidi, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu*. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3 September 2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)
Kabupaten Bengkulu Selatan